



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 82 TAHUN 2017

TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai rujukan kebutuhan pegawai dalam perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah atau Subordinat SKPD.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
9. Badan Pengembangan Sumber daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Utara.
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara.
11. Biro Organisasi yang selanjutnya disingkat BO adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang bertugas pada SKPD/UPTD atau yang ditugaskan Gubernur di luar SKPD/UPTD.
13. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas.
14. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Analisis Jabatan
Pasal 2

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.
- (2) Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana digunakan untuk kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

Bagian Kedua
Analisis Beban Kerja
Pasal 3

- (1) Analisis Beban Kerja sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi kebutuhan PNS berdasarkan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

BAB III
KEGUNAAN
Pasal 4

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk :
 - a. Perencanaan kebutuhan PNS;
 - b. Rekrutmen Calon PNS;
 - c. Penempatan PNS;
 - d. Pendidikan dan Pelatihan PNS;
 - e. Pengembangan PNS; dan
 - f. Kesejahteraan PNS.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangannya oleh :
 - a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c. BKD;
 - d. Biro Organisasi.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
 - a. Nama jabatan;
 - b. Kode jabatan;
 - c. Unit kerja;
 - d. Ikhtisar jabatan;
 - e. Uraian tugas;
 - f. Bahan kerja;
 - g. Perangkat/alat kerja;
 - h. Hasil kerja;
 - i. Tanggung jawab;
 - j. Wewenang;
 - k. Korelasi jabatan;
 - l. Kondisi lingkungan kerja;
 - m. Resiko bahaya;
 - n. Syarat jabatan;
 - o. Prestasi yang diharapkan; dan
 - p. Butir informasi lain.
- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan beban kerja jabatan.
- (4) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (5) Penetapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana setelah mendapat validasi dari Biro Organisasi.

BAB V
KEWENANGAN
Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro Organisasi.
- (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan SKPD/UPTD terkait dan/atau pihak lain.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN
Pasal 7

- (1) Biro Organisasi melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan kedudukan penempatan pegawai dalam jabatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh BKD dan Biro Organisasi.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro Organisasi dapat berkoordinasi dengan SKPD/UPTD terkait.
- (4) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Organisasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Desember 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE


Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 82

No	NAMA	JABATAN	TARAF
1	Drs. H. Zainuddin HZ, M.Si	Asisten Administrasi Umum	
2	Djoko Isworo, SH, MH	kepala Biro Hukum	
3	Drs. H. Abdul Madjid, M.Si	Kepala Biro Organisasi	

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Desember 2017

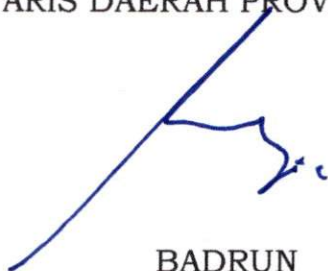
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 82

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Desember 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8





Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Desember 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE

No	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs.H. Badrun, M.Si	Sekretaris Daerah	
2	Drs.H. Zainuddin HZ, M.Si	Asisten Administrasi Umum	
3	Djoko Isworo, SH, M.H	Kepala Biro Hukum	
4	Drs.H. Abdul Madjid, M.Si	Kepala Biro Organisasi	

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 82 TAHUN 2017
 TENTANG HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA
 BEBAN KERJA PADA DINAS PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
 PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA
 PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO.	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Kepala Dinas	1					
	1. Sekretaris		1				
	1.1 Kepala Sub Bagian Perencanaan			1			
	1) Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja				1		
	2) Analis Anggaran				1		
	3) Analis Perencanaan Program				1		
	4) Analis Perencanaan Anggaran				1		
	1.2 Kepala Sub Bagian Keuangan			1			
	1) Analis Keuangan				1		
	2) Bendahara Pengeluaran				1		
	3) Verifikator Keuangan				1		
	4) Pengadministrasi Keuangan				1		
	5) Pengadministrasi Penganggaran				1		
	6) Pranata Laporan Keuangan (SAI)				1		
	7) Pengolah Data Perbendaharaan				1		
	8) Analis Laporan Keuangan				1		
	9) Pengolah Daftar Gaji				1		
	10) Pengadministrasi Pajak				1		
	1.3 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			1			

1	2	3	4	5	6	7	8
	1) Analis Jabatan				1		
	2) Pengadministrasi Kepegawaian				1		
	3) Pengadministrasi Surat				1		
	4) Pengelola Barang Milik Negara				1		
	5) Pengolah Data Barang Inventaris				1		
	6) Pranata Arsip Kepegawaian				1		
	7) Pengemudi Kendaraan Dinas				1		
	8) Pengolah Data Kepegawaian				1		
	9) Pramuka Kebersihan				2		
	10) Petugas Keamanan Kantor				2		
	11) Analis Sistem Informasi dan Jaringan				1		
	2. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga		1				
	2.1 Kepala Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi			1			
	1) Analis Data Ekonomi Makro				1		
	2) Analis Ekonomi Kreatif				1		
	3) Pengelola Data Kelembagaan				1		
	4) Analis Dampak Ekonomi				1		
	2.2 Kepala Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang SOSPOLKUM			1			
	1) Analis Masalah Sosial				1		
	2) Analis Produk Hukum				1		
	3) Analis Politik Dalam Negeri				1		
	4) Analis Dampak Sosial				1		
	5) Pengelola Kesejahteraan Sosial				1		
	6) Pengadministrasi Hukum				1		
	7) Pengelola Data				1		
	2.3 Kepala Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan dan Gender Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga			1			
	1) Analis Kualitas Kehidupan Keluarga				1		

1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Analis Kesejahteraan Keluarga				1		
	3) Analis Ketahanan Keluarga				1		
	4) Analis Informasi				1		
	5) Pengelola Penguatan Pengarusutamaan Gender				1		
	3. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak		1				
	3.1 Kepala Seksi Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya			1			
	1) Analis Pendidikan				1		
	2) Analis Pembelajaran Pembinaan Pendidikan Masyarakat				1		
	3) Analis Informasi Kebudayaan				1		
	4) Analis Informasi Pengembangan Sumberdaya Manusia				1		
	5) Analis Kelembagaan Pembinaan Pendidikan				1		
	6) Pengadministrasi Pendidikan dan Kebudayaan				1		
	3.2 Kepala Seksi Hak Sipil Informasi Dan Partisipasi			1			
	1) Analis Perlindungan Hak – Hak Sipil dan HAM				1		
	2) Analis Peraturan Perundang – Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang - Undangan				1		
	3) Analis Hukum				1		
	4) Analis Sistem Informasi				1		
	5) Analis Pelayanan				1		
	6) Pengelola Data Sistem Informasi dan Diseminasi Hukum				1		
	7) Pengadministrasi Umum				1		
	3.3 Kepala Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan			1			
	1) Analisis Kesehatan				1		
	2) Analis Kesejahteraan Rakyat				1		
	3) Pengadministrasi Umum				1		

1	2	3	4	5	6	7	8
	4. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak		1				
	4.1 Kepala Seksi Perlindungan Perempuan			1			
	1) Analis Perlindungan Perempuan				1		
	2) Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak				1		
	3) Analis Pengadministrasi Pemberdayaan Perempuan, Organisasi Perempuan dan Partisipasi Masyarakat				1		
	4.2 Kepala Seksi Perlindungan Anak			1			
	1) Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak				1		
	2) Analis Hukum				1		
	4.3 Kepala Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak			1			
	1) Analis Data dan Informasi				1		
	2) Pengelola Sistem Informasi				1		
	3) Pengolah Data				1		
	5. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		1				
	5.1 Kepala Seksi Pengendalian Penduduk Advokasi dan KIE			1			
	1) Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil				1		
	2) Penyusun Pencatatan dan Pelaporan Data				1		
	3) Pengolah Data				1		
	4) Pengadministrasi Kependudukan				1		
	5.2 Kepala Seksi Keluarga Berencana			1			
	1) Analis Keluarga Berencana				1		
	2) Analis Advokasi dan KIE				1		
	3) Analis Pembinaan Keluarga Berencana				1		
	4) Analis Sarana Program Keluarga Berencana				1		
	5) Penyusun Bahan Pembinaan Penyuluh Keluarga				1		
	5.3 Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			1			

1	2	3	4	5	6	7	8
	1) Analis Ketahanan Keluarga				1		
	2) Analis Keluarga Sejahtera				1		
	3) Pengelola Layanan BKB, BKR dan BKL				1		
	4) Penyusun Bahan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga				1		
	Jumlah	1	5	15	80		
	Jumlah Total				101		

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

Diundangkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 29 Desember 2017




SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



BADRUN

IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 82

No	NAMA	JABATAN	TAMBAH
1	Drs.H. Zamuddin Hz, M.Si	Asisten Administrasi Umum	
2	Djoko Isworo, SH, MH	Kepala Biro Hukum	
3	Drs.H. Abdul Madjid, M.Si	Kepala Biro Organisasi	

1	2	3	4	5	6	7	8
	1) Analis Ketahanan Keluarga				1		
	2) Analis Keluarga Sejahtera				1		
	3) Pengelola Layanan BKB, BKR dan BKL				1		
	4) Penyusun Bahan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga				1		
	Jumlah	1	5	15	80		
	Jumlah Total				101		

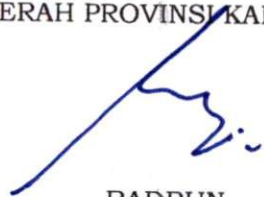
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 82

1	2	3	4	5	6	7	8
	1) Analis Ketahanan Keluarga				1		
	2) Analis Keluarga Sejahtera				1		
	3) Pengelola Layanan BKB, BKR dan BKL				1		
	4) Penyusun Bahan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga				1		
	Jumlah	1	5	15	80		
	Jumlah Total				101		

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,






IRIANTO LAMBRIE

1	2	3	4	5	6	7	8
	1) Analis Ketahanan Keluarga				1		
	2) Analis Keluarga Sejahtera				1		
	3) Pengelola Layanan BKB, BKR dan BKL				1		
	4) Penyusun Bahan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga				1		
	Jumlah	1	5	15	80		
	Jumlah Total				101		

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs. H. BADRUN, M. Si	SEKRETARIS DAERAH	
2	Drs. H. ZAINUDDIN H2, M. Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3	Djoko ISWORD, SH, MH	KARO HUKUM	
4	Drs. H. ABDUL MADJID S, S. Si	KARO ORGANISASI	